
Non-Empiris

SISTEM PENANGANAN DINI KONFLIK SOSIAL DENGAN NUANSA AGAMA

^aSubhan El Hafiz

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

^asubhanhafiz@uhamka.ac.id

Abstrak

Artikel ini mencoba mendeskripsikan model penanganan konflik sosial bernuansa agama agar tidak lagi terjadi kecolongan dimana pihak yang terkait gagal memprediksi kemungkinan terjadinya konflik sosial dengan nuansa agama. Sistem ini disusun berdasarkan artikel penelitian mengenai sistem peringatan dini konflik sosial. Hasilnya, beberapa hal harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang ada pada kondisi psikososial dimasyarakat.

Kata kunci : Sistem Penanganan Dini, Konflik Sosial, Agama

PENDAHULUAN

Upaya merumuskan sistem penanganan dini bencana sosial akibat konflik bernuansa agama semakin mendesak, terutama jika melihat fenomena masih maraknya konflik sosial bernuansa agama yang seringkali seolah meletus secara tiba-tiba akibat aparat yang berwenang tidak memahami kondisi sosial yang menjadi indikator eskalasi konflik. Artikel ini dibuat berdasarkan artikel yang meneliti tentang munculnya eskalasi konflik sosial bernuansa agama pada beberapa wilayah di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dalam penggalian data terhadap masyarakat yang mengalami kondisi konflik sosial berlatar belakang agama. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian tersebut sebagai lokasi penelitian adalah Sampang, Cikuesik, dan

Bogor. Lokasi ini dipilih karena pada saat penelitian konflik masih cukup baru dan memiliki latar belakang agama yang cukup kuat untuk mendasari terjadinya konflik (lihat El Hafiz, Amir, & Kumala, 2015).

Secara khusus, kasus Sampang merupakan konflik antar aliran agama, Cikuesik merupakan konflik antara agama 'resmi' dan kelompok yang dianggap menghina dengan alirannya, sedangkan Bogor merupakan konflik antar agama. Berdasarkan tiga tipe konflik ini maka akan didapatkan gambaran yang lebih utuh dan lebih luas terkait dengan gradasi munculnya konflik. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan pada banyak bencana sosial yang muncul terutama bencana sosial berlatar agama.

Adapun orang-orang yang terlibat sebagai respondennya dalam penelitian

tersebut sangat luas dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tak langsung dengan konflik yang terjadi. Beberapa diantara responden penelitian adalah wartawan yang meliput konflik, mantan ketua MUI provinsi, masyarakat yang menjadi korban, masyarakat yang dianggap sebagai pelaku, dsb. Dengan demikian, sistem yang dihasilkan memiliki gambaran yang utuh terkait dengan fase kejadiannya.

Sistem Peringatan Dini Bencana Sosial

Berdasarkan hasil penelitian tersebut yang dilakukan El Hafiz, Amir, & Kumala (2015) dapat disimpulkan tahap terjadinya bencana sosial berupa konflik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Tahap pertama terjadinya konflik adalah penguatan perbedaan antar kelompok yang dilakukan secara terbuka dan massif disertai kebencian terhadap kelompok lain. Pada tahap kedua, mulai terjadi konsolidasi masing-masing kelompok keluar dan kedalam terkait ancaman yang berasal dari kelompok lawannya. Pada tahap ketiga, pra konflik memasuki fase kritis dimana kondisi psikososial sudah siap dipicu untuk menjadi konflik yaitu adanya ancaman kekerasan dan penggunaan senjata terhadap kelompok lain baik dalam rangka penyerangan atau pertahanan.

Penelitian tersebut membuktikan bahwa konflik sosial bukanlah sesuatu yang

terjadi secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Creative Associates International (Juni 2013) bahwa konflik sosial dapat diprediksi walaupun terjadi eskalasi yang sangat cepat dalam proses sosialnya. Namun untuk melihat faktor pemicu dari meletusnya sebuah konflik sosial, hampir tidak ada model yang berlaku umum sehingga apapun masalah sebagai pemicunya jika kondisi psikososial sudah siap dan mengarah pada konflik maka konflik sosial sangat sulit untuk dihindari.

Secara lebih khusus, sistem peringatan dini konflik sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Level Waspada

Berdasarkan hasil penelitian, level terendah terjadinya bencana konflik sosial, yaitu level waspada, adalah ketika masyarakat dalam sebuah komunitas mulai memperlakukan perbedaan dan menunjukkan ketidaksukaan terhadap perbedaan tersebut. Secara umum setiap individu berbeda satu dengan yang lain, namun memperlakukan perbedaan dan mulai menunjukkan ketidaksukaan dalam bentuk keluhan terkait dengan perbedaan adalah kondisi awal terjadinya konflik sosial. Keluhan ini akan dapat disebabkan adanya kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, persaingan politik, kekuasaan, dsb.

Jumlah keluhan terhadap perbedaan yang ada antar kelompok meningkat. Semakin banyak keluhan yang tidak dapat diselesaikan terkait dengan perbedaan dua kelompok dan maka kondisi ini menjadi semakin mudah untuk masuk pada fase berikutnya dari konflik yang berkembang. Semakin besar keluhan maka kondisi ini dapat mengarahkan pada kebencian terhadap perbedaan.

Bila disederhanakan maka pada level ini terjadi tiga hal yang sudah disampaikan oleh *Creative Associates International* (diakses Juni 2013) yaitu (1) meningkatnya intensitas dan jumlah keluhan terhadap kelompok lain. (2) Meningkatnya kesadaran akan perbedaan yang mendorong munculnya persepsi dan sikap yang berbeda terhadap kelompok lain (3) Meningkatnya intensitas emosi negatif dan psikis yang dibangun dalam kelompok terhadap kelompok lain.

Level Siaga

Pada level ini, berkembang kebencian terhadap kelompok lain dan kelompok tersebut diposisikan sebagai lawan. Kebencian mendorong berkembangnya persepsi bahwa kelompok lain sebagai penyebab masalah yang dihadapi oleh kelompok yang merasa dirugikan. Dengan demikian, cara untuk mengembalikan kondisi sebelumnya, yang

dianggap lebih baik, adalah dengan menyingkirkan kelompok tersebut.

Pada saat ini terjadi mobilisasi kekuatan politik yang ditandai dengan semakin menguat dan semakin sering terjadi interaksi dalam kelompok yang bertujuan untuk konsolidasi dalam rangka menghadapi kelompok lawan. Pada level ini, penggunaan fasilitas publik, seperti: balai desa, rumah ibadah, pengeras suara, surat terbuka, dsb. semakin sering dilakukan untuk memobilisasi kekuatan dan menunjukkan kebencian pada kelompok lain.

Pada level siaga ini mobilisasi kekuatan tidak hanya dilakukan ke dalam namun juga dilakukan keluar dengan mencari dukungan pada tokoh atau institusi yang dianggap memiliki kekuatan politik yang lebih besar. Pada saat ini, komunikasi antar anggota kelompok semakin intensif dalam rangka menghadapi kelompok lain. Dukungan politik secara terbuka atau terselubung oleh tokoh yang dianggap lebih memiliki kekuatan politik, baik dalam bentuk kunjungan maupun pernyataan publik, terhadap salah satu kelompok juga mengindikasikan menguatnya konsolidasi dalam kelompok.

Untuk menyederhanakan level ini maka kondisi psikososial yang muncul adalah (1) tingginya interaksi dan komunikasi langsung antar individu dalam kelompok dalam upaya menghadapi kelompok lain. (2) Tingginya mobilisasi politik dan organisasi

yang berada dibelakang masing-masing kelompok dalam rangka mencari dukungan untuk menghadapi kelompok lain. (3) Meningkatnya kohesivitas antara pimpinan kelompok dan anggotanya terutama dikaitkan dengan upaya perlawanan atau penyerangan.

Level Awas

Level awas adalah level tertinggi dalam tingkat kewaspadaan konflik sosial. Pada level ini, konflik sudah siap meledak dari gesekan sekecil apapun, seperti: kerusuhan antar pemuda, perebutan wilayah, kecelakaan kecil, masalah cinta,

dsb. Pada level ini aparat keamanan maupun media sering melihat bahwa penyebab konflik hanya berasal dari pemicunya padahal kondisi psikososial menunjukkan bahwa pemicu dapat muncul dalam bentuk yang akan menyebabkan pecah konflik.

Pada level ini, beberapa gejala psikososial yang muncul adalah perilaku bermusuhan yang ditunjukkan oleh satu kelompok pada kelompok lain, seperti: ancaman, penghinaan, pengusiran, pembunuhan, penyerangan, dsb. yang dilakukan secara masif. Perilaku bermusuhan ada yang ditunjukkan secara terbuka dan yang terselubung. Perilaku bermusuhan ini menjadi pola interaksi antar kelompok yang

Tabel 1
Indikator Level Eskalasi Bencana Sosial

Tahap Konflik	Indikator
Waspada (level 1)	(1) Meningkatnya intensitas dan jumlah keluhan terhadap kelompok lain. (2) Meningkatnya kesadaran akan perbedaan yang mendorong munculnya persepsi dan sikap yang berbeda terhadap kelompok lain (3) Meningkatnya intensitas emosi negatif dan psikis yang dibangun dalam kelompok terhadap kelompok lain
Siaga (level 2)	(1) Tingginya interaksi dan komunikasi langsung antar individu dalam kelompok terkait upaya menghadapi kelompok lain. (2) Tingginya mobilisasi politik dan organisasi yang berada dibelakang masing-masing kelompok dalam upaya mencari dukungan untuk menghadapi kelompok lain. (3) Meningkatnya kohesivitas antara pimpinan kelompok dan anggotanya terutama dikaitkan dengan upaya perlawanan atau penyerangan
Awas (level 3)	(1) Meningkatnya perilaku bermusuhan antar kelompok baik fisik maupun verbal. (2) Berkembang upaya penggunaan senjata untuk menghadapi atau mengancam kelompok lain. (3) Kelompok semakin terbagi dalam dikotomi dan jumlah kelompok yang menjadi pendukung masing-masing sisi terus meningkat.

berpotensi konflik.

Penggunaan senjata secara terbuka untuk mengancam ataupun hanya sebatas beredarnya isu adanya penggunaan atau persiapan senjata makin marak sehingga tiap orang merasa harus waspada dan menyiapkan diri untuk serangan atau diserang. Pada level ini senjata menjadi investasi penting dalam kelompok. Senjata tersebut juga dapat berbentuk senjata tajam atau senjata, batu, senjata api, atau senjata-senjata tradisional.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada level ini terjadi (1) meningkatnya perilaku bermusuhan antar kelompok baik fisik maupun verbal. (2) Berkembang upaya penggunaan senjata untuk menghadapi atau mengancam kelompok lain. (3) Kelompok semakin terbagi dalam dikotomi dan jumlah kelompok yang menjadi pendukung masing-masing sisi terus meningkat.

Dengan demikian sistem peringatan dini untuk mendeteksi bencana sosial ini, diharapkan dapat lebih mampu mengatasi kelemahan beberapa perangkat sistem peringatan dini lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Schmeidl & Jenkins (1998). Sistem ini diharapkan lebih reliabel dibanding sistem lainnya karena berada pada level mezzo. Tentunya dengan sistem ini diharapkan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya bencana sosial berupa konflik antar kelompok masyarakat.

PEMBAHASAN

Sistem Penanganan Dini Bencana Sosial

Berdasarkan sistem peringatan dini yang sudah dijelaskan diatas, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mencegah konflik berdasarkan sistem yang ada? Apa yang perlu dilakukan? Siapa yang bertanggungjawab pada tiap level?

Level Waspada

Pada level ini terjadi peningkatan intensitas dan jumlah keluhan terhadap kelompok lain. Keluhan ini bisa disebabkan banyak faktor, diantaranya: ketimpangan sosial, himpitan ekonomi, masalah keadilan, dsb. yang dipersepsikan oleh salah satu kelompok diakibatkan oleh kelompok lain. Dengan demikian, pada level ini perlu segera membuka komunikasi antar kelompok untuk menghilangkan prasangka yang ada sehingga masing-masing kelompok akan saling memahami kebutuhan kelompok lain dan hal-hal yang dipermasalahkan oleh kelompok lain untuk segera dicarikan solusi.

Adapun terkait meningkatnya kesadaran akan perbedaan yang mendorong munculnya persepsi dan sikap yang berbeda terhadap kelompok lain juga muncul dari sumber masalah yang sama, ekonomi, keadilan, dsb. Dalam rangka menurunkan potensi konflik, maka pada level ini juga perlu bangun semangat kebersamaan dalam berbagai kegiatan bersama. Adapun tujuannya adalah

menurunkan kesadaran akan perbedaan dan meningkatkan semangat kebersamaan.

Sedangkan dalam rangka mengatasi peningkatan intensitas emosi negatif dan psikis yang dibangun dalam kelompok terhadap kelompok lain perlu diadakan kegiatan bersama dimana antar kelompok diajak bekerjasama saling membantu untuk tujuan yang sama. Pemerintah perlu menyediakan sarana agar muncul sebuah kegiatan yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun pengawasan pada level ini harus berada pada aparat pemerintah yang terendah, yaitu RT, RW, dan Kelurahan atau Aparat Desa. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang muncul masih sangat subjektif dan penuh dengan nuansa psikologis yang belum tentu tepat. Kebencian terhadap seseorang, konflik antar individu, dan masalah-masalah lain dapat menjadi sumber meningkatnya ketegangan pada level ini. Namun tidak dapat dipungkiri, sumber masalah tetap harus diatasi, seperti: masalah keadilan, penegakan hukum, ketimpangan ekonomi, dsb.

Level Siaga

Kondisi sosial mulai masuk pada level ini apabila aparat desa atau kelurahan beserta jajaran RT dan RW tidak dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada level pertama dengan baik. Dengan demikian, pada level ini

penanganan masalah perlu masuk pada tingkat yang lebih tinggi, misalnya aparat kecamatan dan pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini dikarenakan pada level ini masalah sudah semakin meluas dan masyarakat sudah mulai mengabaikan sebab awal dari permasalahan.

Tingginya interaksi dan komunikasi langsung antar individu dalam kelompok terkait upaya menghadapi kelompok lain yang terjadi pada level ini perlu diatasi dengan upaya pemerintah daerah setempat untuk selalu hadir dalam acara pertemuan dan mulai melakukan counter-informasi yang mengarah pada upaya menyerang pihak lain. Selain dalam acara pertemuan, pemerintah daerah setempat juga perlu melakukan sosialisasi yang intens dalam upaya memberikan informasi yang lebih baik dan terbuka dalam rangka menurunkan ketegangan antar kelompok. Berbagai media dapat diupayakan agar informasi yang beredar tidak semakin memanaskan suasana dan hubungan antar kelompok.

Adapun tingginya mobilisasi politik dan organisasi yang berada dibelakang masing-masing kelompok dalam upaya mencari dukungan untuk menghadapi kelompok lain perlu diatasi dengan pengawasan terhadap informasi yang masuk dari kelompok luar untuk tidak memperkeruh suasana. Pemerintah daerah mungkin dapat melakukan pengawasan

terhadap orang asing yang mungkin dapat mewakili organisasi yang akan mendukung salah satu kelompok. Pemerintah dalam hal ini juga perlu bekerjasama dengan aparat dari daerah lain untuk mencegah meluasnya kesalahan informasi yang dapat menjadi sumber konflik.

Terkait dengan kondisi meningkatnya kohesivitas antara pimpinan kelompok dan anggotanya terutama dikaitkan dengan upaya perlawanan atau penyerangan pemerintah daerah setempat perlu memfasilitasi dialog dengan pimpinan kelompok yang bersebrangan. Komunikasi dengan pimpinan kelompok dan antar pimpinan kelompok yang positif, nantinya perlu diteruskan ke bawah sehingga masyarakat tidak semakin tersulut emosinya karena pimpinan kelompok tidak memahami situasi yang menyebabkan konflik. Pada saat ini, aparat

pemerintah harus hati-hati untuk tidak terlihat seolah mendukung salah satu kelompok yang bersebrangan.

Level Awas

Kegagalan pada level siaga akan berakibat pada kondisi sosial semakin mengkhawatirkan dan masuk dalam level bencana sosial yang paling berbahaya, level waspada. Dengan demikian, penanggungjawab pada level ini dapat diserahkan pada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial berupa konflik. Adapun hal yang perlu dilakukan juga disesuaikan dengan kondisi psikososial yang berkembang dimasyarakat.

Adanya peningkatan perilaku bermusuhan antar kelompok baik fisik maupun verbal perlu segera dicegah dengan melakukan sensor yang ketat terhadap

Tabel 2
Penanganan Dini Bencana Sosial

Tahap Konflik	Penanganan
Waspada (level 1)	(1) membuka komunikasi antar kelompok untuk menghilangkan prasangka (2) menurunkan kesadaran akan perbedaan dan meningkatkan semangat (3) bangun semangat kebersamaan dalam berbagai kegiatan bersama
Siaga (level 2)	(1) melakukan counter-informasi yang mengarah pada upaya menyerang pihak lain (2) melakukan pengawasan terhadap orang asing yang mungkin dapat mewakili organisasi yang akan mendukung salah satu kelompok (3) memfasilitasi dialog dengan pimpinan kelompok yang bersebrangan
Awis (level 3)	(1) melakukan sensor yang ketat terhadap informasi yang bersifat menyerang kelompok lain (2) melakukan razia atau sweeping terkait dengan penggunaan senjata yang tidak semestinya (3) membatasi izin bagi warga untuk berkumpul

informasi yang bersifat menyerang kelompok lain. Sensor ini dapat dilakukan pada media massa yang banyak diakses masyarakat sehingga informasi tidak menjadi bahan bakar tambahan untuk terjadinya konflik. Aparat keamanan juga perlu segera menindak pihak manapun, dengan tetap menjaga agar tidak dianggap mendukung salah satu pihak, yang terbukti melakukan penyebaran informasi yang bersifat menyulut permusuhan.

Adapun terkait dengan berkembangnya upaya penggunaan senjata untuk menghadapi atau mengancam kelompok lain, aparat keamanan perlu melakukan razia atau sweeping terkait dengan penggunaan senjata yang tidak semestinya. Netralitas sangat perlu dijaga karena razia senjata oleh aparat dapat dianggap dukungan kepada pihak lain sehingga aparat desa dan aparat keamanan perlu terus menjaga informasi agar tidak dimanipulasi oleh pihak yang bersebrangan. Dengan demikian tidak ada ruang untuk terus mengembangkan kebencian akibat informasi yang salah.

Kelompok yang semakin terbagi dalam dikotomi dan jumlah kelompok yang menjadi pendukung masing-masing sisi terus meningkat perlu diatasi dengan ketegasan aparat pemerintahan untuk membatasi izin bagi warga untuk berkumpul. Hal ini dikarenakan potensi konflik sangat besar untuk terjadi sehingga

perlu ada pembatasan. Selain itu, masing-masing kelompok perlu diminimalisir kemungkinan untuk saling bertemu secara langsung karena masalah sekecil apapun dapat menjadi api pemicu bagi bencana sosial.

Namun demikian, sistem penanganan dini diatas bersifat kumulatif, artinya upaya penanganan pada level yang lebih tinggi tetap perlu menyertakan penanganan pada level-level sebelumnya. Sehingga pada level Awas dimana aparat dapat melakukan razia kepemilikan senjata, upaya untuk mempertemukan pimpinan kelompok yang bertikai juga perlu terus dilakukan. Dan hal yang paling perlu diwaspadai adalah jangan sampai aparat pemerintahan terlihat mendukung salah satu kelompok yang bersebrangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik sosial yang terjadi akibat radikalisme agama bukanlah suatu yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal itu dapat dideteksi sejak dini. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tahap terjadinya konflik sosial akibat radikalisme agama berawal dari keluhan akibat perbedaan dan upaya menunjukkan kebencian terhadap perbedaan tersebut. Pada tahap berikutnya adalah upaya konsolidasi keluar dan ke dalam kelompok

dalam rangka menguatkan kelompoknya sebagai upaya mengatasi kelompok lain. Pada tahap terakhir yang siap dipicu menjadi konflik sosial terbuka adalah adanya ancaman penggunaan senjata dan perilaku kekerasan (fisik maupun verbal) terhadap kelompok lain baik sebagai bentuk serangan atau pertahanan.

Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah dan pihak keamanan untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan sesuai berdasarkan fakta lapangan dan level kegawatan menuju konflik. Dengan tindakan yang tepat sesuai dengan levelnya maka diharapkan konflik sosial yang terjadi akibat radikalisme agama dapat dihindari. Secara khusus, kajian konseptual mengenai konsep penanganan dini konflik sosial berlatar belakang radikalisme agama agar tidak

mencederai demokrasi dan kebebasan juga perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creative Associates International (Akses Juni 2013). *Understanding Conflicts and Peace*.
http://www.creativeassociatesinternational.com/CAIStaff/Dashboard_GIROAdminCAIStaff/Dashboard_CAIIAdminDatabase/resources/ghai/understanding.htm
- El Hafiz, S., Y. Amir., A. Kumala. (2015). *Sistem Peringatan Dini Konflik Sosial Bernuansa Agama dalam Revolusi Mental: Makna dan Realisasi*, edited by Panggabean, Supratiknya, & Utama
- Schmeidl, S., & Jenkins, J. C. (1998). The early warning of humanitarian disasters: Problems in building an early warning system. *The International Migration Review*, 32(2), 471-486